KALENDER KEGIATAN TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN		ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												Ket.
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Bidang Pemberdayaan Perempuan																									
1	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pembangunan Gender	25%	25%	25%	25%	**1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)				Sub Koordinator PUG Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan													
		Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan					1.1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga Pemerintah Kewenangan provinsi yang melaksanakan Pengarusutamaan gender (PUG) yang harus ditingkatkan																	
							1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	305	orang	110,539,075.00															
							1.2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Pemberian penguatan dan pengembangan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi				Sub Koordinator PUG Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan														
							1.2.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	255	orang	469,999,784.00															
							1.3. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Kewenangan Provinsi	Persentase Pemberian penguatan dan pengembangan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi				Sub Koordinator PUG Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya														
							1.3.1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	1685	orang	97,800,000.00															
							2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KOMPREHENSIF				Sub Koordinator Perlindungan Perempuan														
							2.1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Advokasi Terhadap Para Pihak Lingkup provinsi dan lintas kab/kota yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadpa perempuan																	
							2.1.1Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		350	orang	65,050,000.00														

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN		ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												Ket.
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK																									
							2.2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		26	orang	74,596,000.00													
							1.1. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Dalam Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Keluarga sejahtera	Persentase keluarga yang mempunyai ketahanan akan kerentanan ekonomi, sosial dan psikologis																
1	Meningkatkan Aksi, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Pelayanan Komprehensif	25%	25%	25%	25%	**PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase perempuan korban tindak kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif																	
							Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab / Kota	Persentase Pemberian Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan																
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		200	orang	279,998,352.00	UPTD												
							PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	- Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksanak KtP/A PPT/PKT di Rumah Sakit.																	
BIDANG PERLINDUNGAN ANAK																									
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		200	orang	254,504,000.00														- 1. UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak '- 2. Peraturan Daerah No.7 tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
					- 8 Kab/kota		**- Program Pemenuhan hak Anak**. '- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Sub Keg. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak kewenangan Provinsi	- Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.				- Kasi Permasalah Sosial dan Penangannan Alternatif Anak													- 1. UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak '- 2. Peraturan Daerah No.7 tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. 3. Pepres no. 25 tahun 2021 ttg Kebijakan Kab/kota Layak Anak
UPTD																									
							Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi																		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		1	Dokumen	83,693,076.00														
							Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		1	Dokumen	81,891,980.00														
							-Program Perlindungan Khusus Anak. '- Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/kota. Melalui Keg. Pelatihan PATBM, dan Rapat-Rapat Koord. TPPO	- Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksanak KtP/A PPT/PKT di Rumah Sakit.				- Bidang Perlindungan Anak JF-PSM Sub Kord. Perlindungan Anak													
							Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi		11	kabupaten	74,141,828.00														

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN		ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												Ket.
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
pmd																									
	Pemberdayaan Masyarakat Desa																								
	Meningkatnya penataan kelembagaan desa sesuai dengan standar	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA	25%	25%	25%	25%	***PROGRAM PENATAAN DESA***	PERSENTASE FASILITASI PENATAAN DESA																	
							Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat																		
							Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa		1	monev	45,012,600.00														
	Meningkatnya kerja sama antar desa untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA	25%	25%	25%	25%	***PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA***	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DESA																	
							Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi																		
							Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		1	Dokumen	89,997,264.00														
									72	orang															
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan desa	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	25%	25%	25%	25%	***PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA***	PERSENTASE FASILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																	
							Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																		
							Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		1	monev	50,071,500.00														
							Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		2	kegiatan	244,613,132.00														
							Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa		5	kab/kota	69,997,250.00														
	Meningkatnya fungsi dan peran Lembaga adat desa dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	25%	25%	25%	25%	***PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT***	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																	
							Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
							Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		11	lembaga	125,000,750.00														
							Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		1	Dokumen	114,997,264.00														
									100	orang															
							Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		11	kab/kota	89,999,910.00														
									11	unit															
							Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		15	kegiatan	1,414,765,197.00														

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KEGIATAN		ANGGARAN (RP.)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												Ket.
			TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT	**USIA HARAPAN HIDUP**	25%	25%	25%	25%	**1. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA**	USIA HARAPAN HIDUP				Sub Koordinator KB													
							1.1. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Dalam Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Keluarga sejahtera	Persentase keluarga yang mempunyai ketahanan akan kerentanan ekonomi, sosial dan psikologis																	
							1.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan melalui BKB,BKR,BKLL,UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang ditingkatkan kapasitasnya	11	kab/kota	142,816,762.00															
							2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	USIA HARAPAN HIDUP				Sub Koordinator Kespro													
							2.2. Kegiatan Pengembangan Desain Program,Pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi(KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kepesertaan ber-KB				Sub Koordinator Kespro													
							2.2.1. Sub Kegiatan Pengembangan dan penyediaan materi promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Jumlah materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	11	kab/kota	53,276,524.00															
	MENINGKATNYA AKSES TERHADAP PENDIDIKAN	**RATA RATA LAMA SEKOLAH**	25%	25%	25%	25%	**3. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Rata-rata lama sekolah				Sub Koordinator PK													
							3.1.Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Advokasi Terhadap Para Pihak Lingkup provinsi dan lintas kab/kota yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadpa perempuan																	
							Sub Kegiatan= Penguatan Kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal,Non Formal dan Informal	Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan sosialisasi dan advokasi tentang Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	4	kab/kota	89,252,024.00															